

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komunikasi Politik

Chaffe (dalam Kaid,2004,h.13) secara substansial, komunikasi politik biasa dihubungkan dengan pembicara politik atau penyampaian pesan politik verbal maupun nonverbal, yang dapat mempengaruhi rakyat dan pemegang kekuasaan melalui proses pidato dan debat. Graber & Smith (dalam Soukup 2014,h.2). Bidang komunikasi politik tersebut meliputi konstruksi, pengiriman, penerimaan dan pemrosesan pesan yang berpotensi menimbulkan dampak langsung atau tidak langsung yang signifikan terhadap politik. Sependapat dengan Nimmo bahwa Pengirim pesan atau penerima pesan mungkin saja politisi atau aktor politik, wartawan, anggota kelompok kepentingan, atau masyarakat biasa yang tidak terorganisir. Dan elemen utamanya bahwa pesan tersebut memiliki efek politik yang signifikan terhadap pemikiran, kepercayaan, dan perilaku individu, kelompok, institusi, dan keseluruhan masyarakat dan lingkungan di tempat mereka ada.

Dulu Denton dan Woodward (Ivie,2009,h.99) memahami komunikasi politik pada umumnya sebagai aktivitas yang berorientasi pada “proses” dan berpusat pada “keputusan” yang bertujuan untuk mendapatkan persetujuan segera dari khalayak tertentu yang seringkali hanya dapat dicapai melalui akses media massa. Doris Graber (Canggara,2011,h.30) juga mengingatkan dalam tulisannya *political language* bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga

mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti boikot, protes, dan unjuk ras dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Komunikasi Politik juga memiliki ruang lingkup untuk melibatkan pertukaran informasi di antara individu-individu dan kelompok-kelompok pada semua tingkatan masyarakat. Untuk itu Krans dan Davis (Ardial,2010,h.29) melukiskan komunikasi politik sebagai proses komunikais massa dan elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap prilaku politik. Dalam hal ini Davis membagi komunikasi politik menjadi komunikasi massa dan sosialisasi politik, komunikasi dan informasi politik, penggunaan media dan proses politik, dan konstruksi realitas politik dalam masyarakat.

Arifin (2006,h.86) menyebutkan tujuan lain dari komunikasi politik untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan dalam pembuatan peraturan dan perundang-undangan, bisa pula mengendalikan pendapat atau tuduhan lawan politik (Ardial,2010,h.40). Pentingnya komunikasi politik untuk membangun citra atau identitas politik yang dilakukan ini berkaitan dengan semua hal yang dilakukan oleh aktor politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan-balik tentang isu-isu politik berdasarkan semua aktivitas yang dilakukannya terhadap masyarakat (Firmanzah,2008,h.257).

Sehingga dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik tidak hanya tentang pemilu, kampanye, dan propaganda saja, melainkan

masih banyak hal lain yang dapat dipelajari di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi politik yang dilakukan aktor politik tidak hanya melalui bahasa verbal dan pernyataan tertulis saja, tetapi juga sarana nonverbal seperti pakaian, *make-up*, *hairstyle*, *gesture*, desain logo, dan sebagainya yang semuanya merupakan elemen komunikasi yang bisa dikatakan sebagai citra atau identitas politik (Mulyana,2014,h.76).

Luasnya bidang kajian komunikasi politik, pada akhirnya memunculkan banyak defenisi. Defenisi lain menurut McNair (Hasan,2009,h.25) dalam *An Introduction to Political Communication* mendefenisikan komunikasi politik sebagai *purposeful communication about politic* yang meliputi: *Pertama*, Semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi dan aktor-aktor politik lainnya dengan maksud mencapai tujuan tertentu. *Kedua*, Komunikasi politik ditujukan oleh aktor-aktor politik kepada non-politisi, seperti pemilih dan kolumnis surat kabar. *Ketiga*, komunikasi tentang aktor-aktor tersebut, dan kegiatan-kegiatan mereka, seperti temuan dalam berita, editorial dan bentuk-bentuk media lainnya mengenai politik. Sebagai disiplin ilmu, maka komunikasi politik menurut McNair (Canggara,2011,h.33) memiliki lima fungsi dasar, yakni:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Untuk itu media komunikasi diharapkan memiliki fungsi pengamatan, dan juga fungsi monitoring apa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (*objective reporting*) yang bisa mendidik masyarakat atas realitas fakta tersebut.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.
4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik. Di sini media bisa berfungsi sebagai *watchdog* sebagaimana pernah terjadi dalam kasus mundurnya Nixon sebagai presiden Amerika, karena terlibat dalam kasus Watergate.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat tersalurkan kepada media massa.

Mulyana mengungkapkan (2013,h.26) Pada masa mendatang komunikasi politik di Indonesia akan semakin menarik khususnya setelah tahun 2014 bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum Presiden, ini sejarah baru dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Dalam pemilu 2019, tampaknya Indonesia akan dipimpin oleh generasi baru pasca Orde Baru, meskipun sebagian dari para pemimpin yang lahir dalam Era Reformasi akan tetap berada di panggung politik.

Jumlah massa semakin banyak terutama di kalangan generasi muda, diduga akan bertambah. Ini berarti bahwa *political actor* perlu meningkatkan kepiawaian mereka untuk mempengaruhi rakyat. Rakyat semakin cerdas, karena itu pemimpin yang sekadar pencitraan akan ditinggalkan. Pemimpin yang otentik dan dekat dengan rakyat akan semakin digandrungi.

2.2. Komunikator Politik

Doop (dalam Nimmo,20011,h.30) berpendapat bahwa Komunikator juga memiliki peran dalam proses opini, ia menyarankan agar komunikator politik memiliki kemampuan-kemampuan tertentu yang dapat dikonseptualkan sesuai dengan kemampuan akalnya, pengalamannya sebagai komunikator dengan khalayak yang serupa atau yang tak serupa, dan peran yang dimainkannya di dalam kepribadian oleh motif untuk berkomunikasi.

Menurut Heryanto dan Rumaru (2013,h.15) komunikator politik merupakan orang atau lembaga yang berkepentingan menyampaikan pesan politik kepada pihak lain, baik bersifat formal maupun informal dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama (*mutual understanding*) dengan khalayak yang menjadi sasaran penyampaian pesannya. Komunikator dalam komunikasi politik terdiri atas berikut ini:

1. Politisi : Wakil dan Ideolog

Politisi disebut juga dengan politikus. Politikus dapat dibagi menjadi dua tipe yaitu politisi wakil dan politisi ideologi. Politikus sebagai wakil adalah komunikator politik yang menjadi perwakilan artikulasi kepentingan politik

individu atau kelompok. Politisi wakil ini biasanya tidak lahir dari proses kaderisasi, melainkan dari posisinya sebagai *vote getter* (*pendulang suara*). Dengan popularitas atau posisi yang telah ada sebelumnya, politisi wakil diambil dan dijadikan representasi politik kelompok tertentu. Misalnya selebritas, pengusaha, maupun petinggi militer yang tiba-tiba dijadikan figur politik sebuah partai atau orang yang diusung menjadi bupati, walikota, gubernur, dan sebagainya.

Politikus ideolog adalah komunikator politik yang menjadi kader ideologi dan representasi nilai-nilai normatif yang diusung oleh individu atau kelompok politik biasanya berdasarkan sebuah proses kaderisasi yang panjang. Politikus tipe ini adalah orang yang bercita-cita untuk atau memegang jabatan pemerintah, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karir dan tidak mengindahkan apakah jabatan itu eksekutif, legislatif atau yudikatif. Yang jelas bagi politisi jenis ini, berpolitik sesuai dengan nafas ideologi yang dia yakini jauh lebih penting daripada kepentingan pragmatisnya.

Sementara itu, menurut Daniel Katz (dalam Nimmo,2011,h.31) membedakan politikus ke dalam dua hal yang berkenaan dengan sumber kejuangan kepentingan politikus pada proses politik. Kedua tipe ini, yakni:

- a. Politikus ideologi adalah orang-orang yang dalam politik lebih memperjuangkan kepentingan bersama/publik, mereka tidak begitu terpusat perhatiannya kepada tuntutan seorang langganan atau kelompoknya. Mereka lebih menyibukkan dirinya untuk menetapkan

tujuan kebijakan yang lebih luas mengusahakan reformasi, bahkan mendukung perubahan revolusioner jika hal ini mendatangkan kebaikan lebih bagi bangsa dan negara.

- b. Politikus partisan adalah orang-orang yang dalam proses politik lebih memperjuangkan kepentingan diri atau kelompoknya. Politikus tipe ini biasanya tidak menjadi loyalis partai tertentu, melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan pribadinya, meski suatu saat harus bertentangan dengan prinsip-prinsip normatif partainya.

Dengan demikian, politikus utama yang bertindak sebagai komunikator politik yang menentukan dalam pemerintahan adalah para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dan sebagainya), pejabat legislatif (Ketua MPR/DPR/DPD, ketua fraksi anggota MPR/DPR/DPD, dan sebagainya), dan yudikatif (ketua Mahkamah Agung, ketua anggota Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, dan sebagainya).

Dalam penelitian ini, Basuki Tjahaja Purnama sebagai komunikator politik dalam lingkup eksekutif yang menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja purnama juga termasuk ke dalam politikus ideologi karena ia merupakan produk dari proses kaderisasi, meniti karir politik yang dimulai menjadi ketua DPC (Dewan Perwakilan Cabang) PPIB (Partai Perhimpunan Indonesia Baru) Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Selanjutnya pada tahun 2009, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mencalonkan diri dan terpilih menjadi

anggota DPR RI, duduk di Komisi II. Namun belum habis masa jabatannya, Ahok mendapat pinangan dari Partai Gerindra untuk maju menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo, mantan walikota Solo untuk periode 2012-2017. Di Partai Gerindra Ahok juga sempat menjabat menjadi Ketua DPP Bidang Politik. Pada 2014 Joko Widodo mendapat mandat untuk maju dan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. secara otomatis Ahok mengisi kekosongan Gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada tanggal 19 November sampai sekarang.

2.3. Retorika Politik

Jika ditelusuri dari sejarah ilmu pengetahuan, komunikasi politik sudah dikenal sejak zaman Cicero dan Aristoteles. Minat terhadap hubungan antara komunikasi dan politik secara sistematis telah dimulai dengan karya-karya kaum sophis di Yunani. Kaum sophis merupakan kaum yang menggagas ide demokrasi dan pemerintahan yang mewakili rakyatnya karena itulah pada masa itu, muncul seni berpidato dalam rangka mewarnai proses politik demokrasi dan pandangan-pandangan mengemuka oleh Aristoteles dalam karyanya "*Politic and Rhetoric*". (Suyomukti,2013,h.24).

Aristoteles (dalam Suyomukti,2013,h.28) menjadikan retorika sebagai konsep yang realis. Baginya retorika dapat berarti; *Pertama*, seni persuasi melalui pernyataan logis; *Kedua*, suatu uraian yang harus singkat, jelas dan menakutkan; *Ketiga*, menggunakan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang bersifat memperbaiki (*corrective*); memerintah (*instructive*); mendorong (*suggestive*), dan mempertahankan (*defensive*). Aristoteles (Hunt,2009,h.40) juga menulis di dalam

buku ketiganya bahwa tidaklah cukup untuk mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi juga perlu untuk mengetahui bagaimana mengatakannya, dan seni mengatakan hal-hal yang sangat berpengaruh dalam menanamkan warna tertentu untuk pidato.

Dalam buku *Theories of Human Communication* dikatakan bahwa studi retorika sesungguhnya adalah bagian dari disiplin ilmu komunikasi. Karena kajian retorika secara umum didefensikan sebagai simbol yang digunakan manusia. Pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasi, sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Kemudian, berkembang sampai meliputi proses *adjusting ideas to people and people to ideas* dalam segala jenis pesan. Fokus dari retorika telah diperluas bahkan telah mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal (Littlejohn,2009,h.73).

Kajian retorika erat hubungannya dengan kajian komunikasi politik. Untuk itu penggabungan antara retorika dalam ranah politik akhirnya memunculkan pembahasan mengenai retorika politik. Pemahaman bahwa retorika merupakan seni berbicara (*art of speech*) jika dikaitkan dengan politik maka seperti pernyataan Denton dan Woodward (Ivie,2009,h.1987) retorika politik merupakan instrumen mencapai kekuasaan, retorika politik dikarakteristikkan melalui tujuan jangka pendek, tujuan tertentu, tenggat waktu dekat, konsensus mencari taktik. Sehingga politik bisa dijadikan kontes persaingan untuk mendefinisikan situasi dimana suksesnya kepemimpinan dan kontrol bergantung pada kemampuan

manipulasi simbol politik. Semua bentuk komunikasi politik cocok dengan konsep retorika atau pidato, yang secara harfiah berarti berbicara daripada kategori yang meliputi kampanye iklan, televisi, dan sebagainya, sehingga tidak mengeherankan jika retorika merupakan salah satu area kunci dalam kajian komunikasi politik (Soukup, 2014, h. 8).

Dalam karyanya *Rhetorica*, Aristoteles juga membagi retorika (termasuk retorika politik) ke dalam tiga jenis: (1) *retorika deliberative*, yang dirancang untuk mempengaruhi khalayak dalam kebijakan pemerintah; (2) *retorika forensic*, yaitu retorika yang berkaitan dengan pengadilan, dengan fokus pembicaraan pada masa lalu yang berkaitan dengan keputusan pengadilan, (3) *retorika demonstrative*, yaitu retorika yang mengembangkan wacana yang dapat memuji atau menghujat. Retorika politik pada umumnya menggunakan retorika demonstratif untuk mempengaruhi khalayak (Arifin, 2010, h. 216).

Soukup (2014, h. 8) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Retorika merupakan jantung dari kajian komunikasi politik. Hal tersebut sudah di kritik dan dijelaskan oleh Plato dan Aristotle sebagai seni persuasi. Sehingga tujuan retorika membangkitkan kesadaran ataupun perasaan audiens pada sebuah isu sosial. Seni retorika termasuk wacana deliberatif dan persuasif untuk memandu pengambilan keputusan di tubuh politik (Soukup, 2014, h. 2). Dalam Griffin (2006, h. 321) Aristoteles menyebutkan ada tiga cara untuk mempengaruhi manusia:

- (1) *Ethos*, komunikator harus sanggup menunjukkan kepada khalayak bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas, kepribadian yang terpercaya, dan

status. Sisi Ethos, menurut Aristoteles mengatakan bahwa tindakan retorika tidak hanya cukup berbekal argumen yang menyakinkan belaka melainkan juga harus mampu menampilkan sosok komunikator sebagai komunikator yang kredibel dan terpercaya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kredibilitas komunikatir bisa diperoleh dengan menampilkan karakteristik yaitu: (a) *intelligence*, bukan dalam arti kecerdasan otak atau kepintaran, melainkan diartikan sebagai persepsi khalayak terhadap ada tidaknya kesamaan pandangan antara komunikator dengan khalayaknya terhadap isu yang disampaikan. (b) *character*, upaya yang dilakukan komunikator membangun citra tentang dirinya sebagai sosok yang jujur, bermoral dan dapat dipercaya. (c) *goodwill*, persepsi khalayak bahwa komunikator yang tengah berretorika memang benar memiliki niat yang tulus dan berbuat “kebaikan (*good intentions*) serta tidak dicurigai memiliki agenda-agenda tersembunyi untuk memenangkan hati khalayaknya (Griffin,1997,h.303).

- (2) *Pathos*, komunikator harus menyentuh hati khalayak, perasaan, emosi, harapan, kebencian, dan kasih sayang mereka yang kemudian oleh para ahli retorika modern disebut sebagai emotional appeal.
- (3) *Logos*, pembicara menyakinkan pendengar/khalayak dengan mengajukan bukti atau yang kelihatan sebagai bukti. Pendekatan yang dipakai menggunakan logika.

Dalam penggunaan retorika, komunikator alangkah baiknya mengetahui prinsip atau unsur dasar retorika agar pesannya dapat mempersuasi khalayak. Seperti yang tertulis dalam Littlejohn & Karen Foss (2009, h.73), pusat tradisi retorika terdiri dari lima kanon atau unsur retorika yaitu penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Berikut adalah penjelasannya:

- a) Penemuan (*invention*) adalah mengacu pada konseptualisasi proses saat kita temukan pada apa yang telah ada, tetapi menciptakannya melalui penafsiran dari kategori-kategori yang kita gunakan. Penemuan dimaknai secara luas sebagai *body of information* untuk itu kanon yang pertama ini berhubungan erat dengan *critical thinking* (West & Turner,2007,h.343)
- b) Penyusunan (*arrangements*) adalah pengaturan simbol-simbol menyusun informasi dalam hubungannya dia antara orang-orang, simbol-simbol, dan konteks terkait.
- c) Gaya (*style*) hal ini berhubungan dengan semua anggapan terkait dalam penyajian dari semua simbol sampai makna yang kita berikan pada semua simbol tersebut, sebagaimana dengan semua sifat dari simbol, mulai dari kata-kata dan tindakan sampai pada busana dan perabotan. Penggunaan style yang efektif akan membuat pesan lebih jelas, menarik dan *powerful*. Selain itu Aristoteles menyarankan penggunaan metafora untuk membantu audience memahami hal-hal yang kurang jelas sehingga lebih muda dipahami (West & Turner,2007,h.346)

- d) Penyampaian (*delivery*) adalah perwujudan dari simbol-simbol dalam bentuk fisik, mencakup pilihan nonverbal untuk berbicara, menulis, dan memediasikan pesan.
- e) Daya ingat (*memory*) tidak lagi mengacu pada penghafalan pidato, tetapi dengan cakupan yang lebih besar yaitu mengingat, menyimpan dan mengolah informasi.

Hasil analisis Ardizzone dan Lauerbach (dalam Zaleska,2012,h.2) sumber sumber yang memungkinkan memenuhi syarat wacana aktor politik yaitu politisi, para kandidat, dan partai politik. Yang dianggap wacana politis adalah pidato yang berasal dari seseorang yang dianggap politisi. Sehingga penelitian utama pada retorika politik membahas masalah yang terang-terangan melibatkan hubungan kekuasaan, legitimasi, persaingan kepentingan dan hak-hak kelompok sosial yang besar, kriteria yang berbeda dan nilai-nilai, serta kebutuhan untuk mengambil keputusan konsekuensial (Zaleska, 2012, h.3).

2.4. Dramatisme sebagai Kajian Retorika Baru

Foss berpendapat bahwa Kenneth Burke sering dianggap sebagai salah satu dari Bapak pendiri ‘tradisi retorika baru’. Ia berpendapat Beranjak dari retorika tradisional yang dulunya fokus retorika digunakan sebagai instrumen persuasi yang efektif untuk situasi tertentu. Retorika ‘baru’ menekankan fokus yang lebih luas seperti konteks budaya dan struktur umum dari retorika. Sekarang berfokus cara melihat motif dari bahasa dan penggunaannya oleh komunikator

dari tindakan manusia karena manusia menggunakan simbol-simbol untuk berkomunikasi (Bourgounjon,Rutten,Soetart,Valcke,2011,h.92).

Teori ini banyak dipengaruhi oleh interaksi simbolik. Teori ini memfokuskan pada diri dalam suatu peristiwa yang ada dengan menggunakan simbol komunikasi. Dramatisme memandang manusia sebagai tokoh yang sedang memainkan peran mereka, dan proses komunikasi atau penggunaan pesan dianggap sebagai perilaku yang pada akhirnya membentuk cerita tertentu (Denzim,1992,h.145). Untuk itu drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk tiga alasan (West & Turner,2007,h.27):

- a) Drama mengindikasikan cakupan yang luas, tujuannya adalah untuk berteori mengenai keseluruhan pengalaman manusia. Metafora dramatis khususnya berguna dalam pengalaman manusia. Metafora dramatis khususnya berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasari pada interaksi atau dialog. Dalam dialognya, drama menjadi model hubungan dan menjadi penerangan pada hubungan.
- b) Drama cenderung mengikuti tipe-tipe atau *genre* yang mudah dikenali komedi, musical, melodrama, dan lainnya. Burke merasa bahwa cara seseorang membentuk dan menggunakan bahasa dapat berhubungan dengan cara drama manusia ini dimainkan. Burke berargumen bahwa pola berulang yang menggarisbawahi suatu teks menjelaskan bagaimana teks tersebut menggerakkan kita.

- c) Drama selalu ditujukan kepada khalayak. Dalam hal ini drama bersifat retoris. Burke memandang sastra sebagai “peralatan untuk hidup,” artinya bahwa literatur atau teks yang berbicara pada pengalaman hidup orang serta masalahnya, memberikan orang bereaksi untuk menghadapi pengalaman ini.

Brumett (Griffin, 2005, h.303) menyebutkan asumsi teori dramatisme sebagai ontologi simbolis dikarenakan penekanannya pada bahasa. Ia mengingatkan bahwa “hasil terbaik yang dapat dilakukan seseorang, dalam mencari inti dari pemikiran Burke adalah menemukan sebagian ontologinya, dasar bagi kebanyakan bagian. Bagi Burke, orang umumnya melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan dunia kebanyakan adalah seperti itu adanya, karena sifat dasar dari sistem simbol itu sendiri. Gambaran mengenai tiga asumsi teori dramatisme berikut ini adalah:

1. Manusia adalah hewan yang menggunakan simbol
2. Bahasa dan simbol membentuk sebuah sistem yang sangat penting bagi manusia
3. Manusia adalah pembuat pilihan

Asumsi pertama berbicara tentang hal yang kita lakukan dimotivasi oleh naluri hewan yang ada dalam diri kita dan beberapa hal lainnya dimotivasi oleh simbol-simbol. Ide bahwa manusia adalah hewan yang menggunakan simbol menggambarkan sebuah ketegangan dalam pemikiran Burke. Seperti yang diamati oleh Brummett, asumsi terombang-ambing antara kesadaran bahwa beberapa dari yang kita lakukan dimotivasi oleh sifat naluri hewan dan beberapa oleh sifat

simbolik. Dari semua simbol yang di gunakan manusia, bahasa adalah yang paling penting bagi Burke (West& Turner, 2013, h.28).

Asumsi kedua (mengenai pentingnya bahasa), posisi Burke cukup mirip dengan prinsip relativitas linguistik yang dikenal sebagai hipotesis Sapir–Whorf. Mereka menyatakan bahwa sangat sulit untuk berpikir mengenai konsep atau objek tanpa adanya kata–kata bagi mereka. Jadi, orang dibatasi (dalam batasan tertentu) dalam apa yang dapat mereka pahami oleh karena batasan bahasa mereka. Bagi Burke, seperti halnya Edward Sapir dan Benjamin Whorf, ketika orang menggunakan bahasa, mereka juga digunakan oleh bahasa tersebut. (Nimmo, 2006, h.95). Bahwa aspek bahasa di dalam dramatisme sebagai sesuatu yang penting, karena ia merupakan *the art of delivery* sehingga tampak siapa-siapa yang berbicara manis kemudian pahit, dan sebaliknya. Karakter-karakter ini mengungkapkan tindakan-tindakan utama di dalam cara yang berbeda-beda yang menunjukkan kepentingan yang berbeda (Suparno,2012,h.9).

Sebagaimana dengan penelitian yang telah dilakukan Suparno (2010) judul penelitian “Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia,” bahwa melalui kajian dramatisme dapat menganalisis pernyataan-pernyataan verbal (bahasa politik) serta benturan argumen memperlihatkan adanya situasi (*scene*) saling bersaing dan berkompetisi terhadap makna Reformasi serta bagaimana aktor-aktor-politik berusaha mewujudkannya di arena kekuasaan yang penuh dengan motif-motif kepentingan. Dalam konteks ini, tindakan aktor dapat memperlihatkan apakah kata yang sama digunakan untuk

pengertian yang sama atau apakah kata yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda-beda.

Untuk itu Corcoran (1990,h.51) mengatakan bahwa bahasa politik di dalam konteks simbolik yang lebih luas terhadap oposisi, distingsi dan diferensiasi memunculkan narasi terhadap perselisihan, kontestasi, dan pertarungan. Di manapun ada paksaan (*coersion*), resistensi (*resistance*), dan kekerasan (*violence*), di sana akan ada relevansi intuitif terhadap tatanan politik, apakah luas atau sempit didefinisikan di antara atau di tengah-tengah istilah-istilah yang saling berkontestasi di dalam wacana politik. Di dalam kontestasi ada empat hal penting yang merupakan ciri pokoknya (Suparno,2012,h.8).

1. Apakah setiap aktor (*agent*) menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada di dalam pemikiran mereka tentang kontroversi
2. Kontestasi dapat dicermati dari pihak-pihak yang pro dan pihak-pihak yang kontra.
3. Melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi (kontroversi makna). Hal ini berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif dari isu yang menjadi sumber kontroversi.
4. Kontestasi dapat dicermati dari karakteristik dan sejarah keyakinan serta kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan yang seperti apa yang ditawarkan di dalam kontestasi tersebut.

Sesuatu tidak dapat disebut sebagai drama tanpa menggunakan sejumlah situasi yang ditandai dengan konflik (Burke,1966h.29). Situasi (*scene*) itu diperlukan untuk memperlihatkan adanya panggung drama yang menunjukkan adegan-adegan (*acts*), munculnya masalah-masalah sebagai sumber motivasi yang membentuk plot atau alur (Burke,1966,h.29). Plot itu sendiri merupakan bentuk dasar dari setiap babak suatu drama yang mencerminkan tatanan insiden (*the arrangement of the incidents*) (Fergusson, 1961,h.14).

Untuk itu Kenneth Burke (1945) berpendapat bahwa tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat berdiri sendiri. Ia harus dijelaskan di dalam konteks di mana ia berada. Makna kata ditentukan oleh konteks yang menyertainya, yakni dibatasi oleh konteks kata (*verbal context*) dan konteks situasi (*context of situation*). Melalui konteks verbal dan konteks ekstra verbal (*extraverbal context*) kata dapat ditransformasikan ke dalam berbagai bentuk pernyataan yang memiliki makna yang berbeda-beda.

Burke juga percaya bahwa drama kehidupan dimotivasi oleh rasa bersalah, proses rasa bersalah dan penebusan mengamankan keseluruhan konsep simbolisasi. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban, dan bagaimana sang aktor didorong melakukan pengorbanan untuk mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya (Schultz,2011,h.176). Menurut Burke terdapat pola atau siklus terkait menghilangkan rasa bersalah tersebut, antara lain (West& Turner, 2008,h. 31-33):

a. Tatanan atau hierarki

Tatanan atau hierarki merupakan peringkat yang ada dalam masyarakat, terutama kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa sehingga kategori ini membentuk hierarki sosial. Seringkali seseorang merasa bersalah karena posisinya di dalam hierarki. Jika mempunyai kelebihan, ia mungkin merasa memiliki kekuasaan yang lebih dibandingkan mereka yang tidak punya dan perasaan inilah yang menimbulkan rasa bersalah.

b. Negativitas

Negativitas adalah perasaan menolak tempat seseorang dalam tatanan sosial memperlihatkan resistensi. Burke mengatakan demikian karena simbol yang diciptakan oleh seseorang memungkinkan dirinya untuk membayangkan kesempurnaan. Ia selalu merasa bersalah mengenai perbedaan antara kenyataan yang sesungguhnya dan kesempurnaan yang dapat di bayangkan.

c. Pengorbanan (*victimage*)

Pengorbanan adalah cara individu berusaha memurnikan diri dari rasa bersalah yang di rasakan sebagai bagian dari kondisi manusia. Ada dua tipe dasar pengorbanan/memurnikan rasa bersalah. Pertama adalah mortifikasi (*mortification*). Mortifikasi adalah salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah dengan menyalahkan dirinya sendiri. Kedua adalah pengkambinghitaman (*scapegoating*) yaitu salah satu metode untuk memurnikan diri dari rasa bersalah, dengan mencari faktor

eksternal yang bersalah sebagai penyebab kenapa sesuatu yang diharapkan tidak terjadi.

d. Penebusan

Penebusan adalah langkah terakhir dalam proses ini yang berarti penolakan sesuatu yang tidak bersih dan kembali pada tatanan baru setelah rasa bersalah diampuni sementara. Kunci tahap penebusan adalah fakta bahwa rasa bersalah hanyalah dihilangkan secara sementara. Saat tatanan dan hierarki di bangun kembali, rasa bersalah kembali menjangkiti kondisi manusia.

Menurut Burke (Koehn,2011,h.15) Retorika tidak bisa lepas dari identifikasi karena mempersuasi seseorang hanya sejauh kita dapat berbicara melalui bahasa, gesture tubuh, intonasi, sikap, ide. Dengan demikian retorika tidak akan berhasil jika tidak dapat menemukan kesamaannya dengan pendengarnya. Burke juga berpendapat bahwa manusia menciptakan dan memanipulasi sistim simbolik dimana kita membangun tindakan kita. Dari sudut pandang ini, diri adalah konstruksi sosial dan interaksi manusia adalah sebuah proses negosiasi antara aktor yang terlibat dalam pertunjukkan peran, sebuah drama tergantung pada simbol yang dibangun secara sosial dan turunannya. (Schultz,2011,h.171).

Membandingkan kehidupan dengan sebuah pertunjukan dan menyatakan bahwa sebagaimana dalam sebuah karya teatrikal, kehidupan membutuhkan adanya seorang aktor, sebuah adegan, beberapa alat untuk terjadi pada adegan itu,

dan sebuah tujuan. Teori ini memungkinkan kritikus retorik untuk menganalisis motif pembicara dengan mengidentifikasi dan mempelajari elemen-elemen ini. Tujuan Dramatisme adalah memberikan penjelasan logis untuk memahami motif tindakan manusia, atau kenapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya Burke percaya, rasa bersalah adalah motif utama bagi pembicara, dan dramatisme menyatakan bahwa seorang pembicara akan menjadi lebih sukses ketika mereka memberikan khalayaknya cara untuk menghapuskan rasa bersalah mereka (Turner & West,2007,h.26).

Dramatisme ditandai dengan sejumlah situasi (*scene*) konflik dengan situasi-situasi yang berbeda yang disimbolisasikan dalam bentuk plot atau alur. Plot merupakan bentuk dasar setiap babakan drama yang mencerminkan tatanan insiden (*the arrangement of incidents*). Bahasa dalam drama merupakan tindakan simbolik dan berfungsi sebagai *the art of delivery*. Analisis dramatisme negatisme melalui berbagai simbol. Atas dasar pokok-pokok konseptual dan gagasan tersebut, Burke sebagai pencetus teori dramatisme merekomendasikan sebuah metode penelitian terhadap teori ini, yakni *Pentad Analysis* (Ahmad,2014,h.21).

2.5. Pentad Drama

Selain dramatisme, Burke juga mengembangkan pentad drama sebagai metode yang mempelajari bentuk aktivitas simbolik untuk memahami tindakan manusia (Bourgonjon,Rutten,Soetart,Valcke,h.93). Pentad drama sebenarnya sama dengan standar praktik jurnalistik yang menjawab siapa, apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana di awal cerita. Karena Burke menganggap dirinya

sebagai interpreter dan bukan wartawan, ia tidak puas hanya untuk label lima kategori (Griffin, 2005: 302). Namun Burke menambahkan poin yang keenam, sikap, pada pentad ini membuatnya menjadi hexad, meskipun kebanyakan orang tetap menyebutnya sebagai pentad (West & Turner, 2008, h.33).

Ahmad (2014) berdasarkan tesisnya yang berjudul Strategi komunikasi pembangunan Pesantren Salafiyah Al Munawar Bani Amin Kabupaten Serang Banten (analisis pentad) tertarik menggunakan pentad karena pentad didesain untuk menunjukkan jalur terhadap relasi-relasi kepentingan dan motif-motif humanistik serta fungsi-fungsi dari istilah-istilah yang dipakai manusia. Pentad menawarkan sebuah cara untuk menentukan mengapa tiap tindakan individu di dalam suatu kejadian atau konteks tertentu menyeleksi strategi komunikasi di dalam memberikan pernyataan-pernyataannya di dalam mengidentifikasi situasi yang dihadapinya. Tujuannya memberi perhatian terhadap unsur-unsur *act*, *agent*, *scene*, *agency*, dan *purpose* yang ditujukan untuk menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi simbol yang mereka desain, bekerja di dalam motif-motif dari tindakan simbolik tersebut.

Menurut Burke dalam (West & Turner, 2007, h. 33) terdapat lima elemen poin utama dari pentad dramatisme, yaitu:

1. Tindakan (*act*)

Burke menganggap tindakan sebagai apa yang dilakukan oleh seseorang. Tindakan merupakan aksi yang mengambil peran dalam kisah atau pernyataan yang diberikan oleh pembicara untuk menunjukkan apa yang disampaikan pembicara kepada khalayaknya. Tindakan memainkan peranan yang sangat

penting dalam pentad dramatisme ini. Dalam pidato hal ini menunjukkan komitmen realisme, contohnya : kampanye akbar yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif.

2. Adegan (*scene*)

Adegan merupakan konteks yang melingkupi tindakan. Adegan juga merupakan *setting* atau latar belakang dari tindakan yang dilakukan dan bagaimana *setting* memberikan efek terhadap pesan termasuk dalam adegan ini adalah konteks yang *immediate* (segera) dan konteks sejarah dan situasi sosial dimana tindakan tersebut terjadi. Berbicara di depan umum menekankan pengaturan dan keadaan, merendahkan kehendak bebas dan refleksi sikap determinisme situasional. Contohnya: masa kampanye pemilu calon anggota legislatif atau masa pemilu.

3. Agen (*agent*)

Agen merupakan seseorang atau orang-orang yang melakukan tindakan. Beberapa pesan dipenuhi dengan referensi diri, pikiran, jiwa, dan tanggung jawab pribadi. Fokus terdapat pada karakter dan agen sebagai instigator yang konsisten dengan filosofi idealisme. Contohnya: calon anggota legislatif dalam pemilu.

4. Agensi (*agency*)

Agensi merujuk pada cara-cara yang di gunakan oleh agen untuk menyelesaikan tindakan. Bentuk-bentuk agensi yang mungkin mencakup strategi pesan, penceritaan kisah, permintaan maaf, pembuatan pidato, dan seterusnya. Penjelasan panjang tentang metode atau teknik mencerminkan

pendekatan "*get-the-job-done*" yang bersumber dari pola pikir pembicara yang pragmatism, contohnya: pidato memukau yang dilakukan oleh seorang calon anggota legislatif.

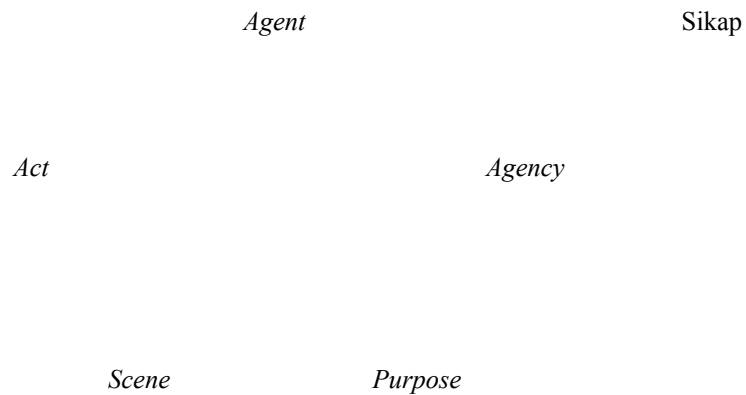
5. Tujuan (*purpose*)

Tujuan merujuk pada hasil akhir yang ada di dalam benak agen untuk tindakan yaitu, mengapa tindakan dilakukan. Tujuan dari lakon baik merupakan tujuan yang eksplisit maupun implisit. Tujuan merupakan alasan dibalik aksi yang dilakukan oleh aktor komunikasi. Tujuan dalam pesan menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak pembicara kesatuan atau makna utama dalam kehidupan, yang umumnya disebut kepentingan misticisme. Contohnya: perolehan suara atau kemenangan dalam pemilu anggota legislatif.

6. Sikap (*attitude*)

Merujuk pada cara di mana seorang aktor memosisikan dirinya dibandingkan dengan orang lain. Contohnya ketika menggunakan pentad untuk menganalisis sebuah interaksi simbolik, penganalisis pertama-tama menentukan semua elemen dari pentad dan mengidentifikasi apa yang terjadi dalam suatu tindakan tertentu. Setelah memberikan label pada poin-poin dari pentad dan menjelaskan semuanya secara menyeluruh, peneliti kemudian mempelajari rasio dramatik (*dramatistic ratio*) atau proporsi dari satu elemen bila dibandingkan dengan elemen yang lainnya. Sehingga dengan menganalisis rasio ini, peneliti mampu menemukan elemen yang paling dominan atau berpengaruh (West & Turner, 2008, h. 34)

Gambar 2.1 Pentad Burke



Sumber: West & Turner, 2008, h.34

2.6. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti memasukkan penelitian yang pernah meneliti kajian komunikasi politik bertema *political actor and rhetoric* dan juga yang menggunakan teori dramatisme serta analisis pentad sebagai metode analisisnya. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan menjadi pembelajaran penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

2.6.1.Senator Barack Obama: *The Rhetoric of Hope and The American Dream.*

Atwater (2007) dalam jurnal penelitiannya mengeksplorasi retorika yang digunakan oleh senator Obama yang dikenal sebagai ahli pengelolaan kesan lewat dialognya yang merupakan *persuasion campaign* untuk mendapatkan simpati dan dukungan massa memilih Obama sebagai Presiden Kulit Hitam pertama di Amerika dengan menyentuh emosional warga Amerika melalui "*Politic of Hope*"

menggunakan retorika tentang kisah hidup dan masa lalunya. Pidato Obama yang telah dikemas dalam bahasa yang mengandung wacana tertentu dengan memproyeksikan visi kesatuan politik untuk memikat hati warga Amerika yang mendengarkan.

Penelitian Atwater diatas telah mendukung serta memperkuat penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan kajian komunikasi politik, *genre actor and rhetoric*. Atwater menunjukkan pentingnya pemilihan kata-kata dalam mengungkap retorika agar dapat membangkitkan emosional khalayak. Kuatnya pesan yang disampaikan aktor sehingga hal tersebut menjadi strategi agar retorika yang disampaikan berkesan dan dapat diterima di masyarakat. Meskipun kesamaan terkait studi *political actor and rhetoric*, terdapat perbedaan antara penelitian Atwater dengan peneliti yaitu dari segi objek penelitian dan jenis penelitian. Atwater menggunakan analisis isi pidato sedangkan peneliti membahas Basuki Tjahaja Purnama menggunakan analisis pentad drama.

2.6.2. *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse*

Schultz (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *A Rhetoric of retribution and redemption: Burke's term for order in the drama of child sexual abuse*. Beliau berusaha menjelaskan motif dari tindakan menggunakan kerangka interpretasi Kenneth Burke ditujukan kepada pelaku pelecehan seksual di Amerika. Melalui penelitian ini wacana *moral panics* dibangun sebagai tindakan pencegahan hasil ekspos oleh surat kabar, khalayak, badan legislatif, dan LSM. Pelaku yang melakukan kejahatan seksual akan dihukum, direhabilitasi dan akan

diberikan label “Predator seksual” yang disimbolisasikan sebagai monster jahat, tua, kotor, serigala berbulu domba.

Hasilnya simbolisasi seperti itu akan membuat pelanggar mengalami perasaan bersalah dan penebusan, rasa malu menghasilkan tindakan isolasi terhadap orang lain karena dianggap sangat keji. Melalui perspektif Burke, membantu kita memahami paksaan di balik sifat ketertiban, dan bagaimana sang aktor didorong untuk pengorbanan untuk mencapai penebusan. Burke berfokus pada cara di mana mendesak untuk pemurnian. Pengalaman dari rasa malu membujuk aktor tersebut untuk meredakan kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Schulz memiliki kesamaan dengan peneliti menggunakan kajian pentad drama selain meneliti retorika serta motif dari tindakan bahwa pentad drama juga dapat mengungkapkan rasa bersalah dan penebusan atas masa lalu seseorang. Perbedaannya Schulz berorientasi pada pelaku pelecehan seksual pada anak-anak sedangkan objek penelitian yaitu seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama.

2.6.3. *The Grand Old Man Indonesia* (Studi Retorika Dramatisme tentang Komunikasi Politik *Genre Political Actor and Rhetoric* pada Tokoh Haji Agus Salim

Penelitian yang menggunakan dramatisme pernah dilakukan di Indonesia oleh Muhdanny Yusuf (2016). Dalam penelitiannya Yusuf mengungkap retorika serta motif dari aktivitas komunikasi politik tokoh sejarah Haji Agus Salim saat berada di dalam organisasi politik, pers dan pemerintahan Indonesia pada zaman pergerakan sampai kemerdekaan nasional. Secara khusus melakukan intepretasi

terhadap pernyataan, ucapan, sikap, gaya berpakaian (penampilan), pidato, tulisan-tulisan Haji Agus Salim saat menjadi jurnalis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif retorika yang dibangun Haji Agus Salim selama zaman pergerakan nasional dan zaman kemerdekaan Indonesia adalah menanamkan cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan pada agama islam meningkatkan kualitas diri bangsa Indonesia, lepas dari penjajahan serta mendorong terbentuknya pemerintahan sendiri dan pemerintahan yang baik di Indonesia serta mengusung islam sebagai dasar sikap nasionalisme dan patriotisme.

Terdapat banyak kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Mulai dari sama-sama mengambil tema *political actor and rhetoric*, jenis penelitian kualitatif dan juga sama-sama menggunakan teori dramatisme serta analisis pentad sebagai metode analisisnya. Letak perbedaan hanya pada objek penelitian jika Yusuf mengenai tokoh sejarah Indonesia Haji Agus Salim sedangkan peneliti objeknya seorang aktor politik Basuki Tjahaja Purnama.

2.6.4. *From Counter-strike to Counter-Statement using Burke's pentad as a tool for analysing video games*

Dalam penelitiannya Bourgonjon, Rutten, Soetart, Valcke (2011) bertujuan menganalisis proses antara gamers dan permainan mereka menggunakan analisis pentad drama pada *video games Bioshock* memperlihatkan berbagai konflik dramatis melalui dialog yang ditampilkan dengan *prosedural rhetoric* dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku pemain dalam bertindak sebagai

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dengan segala konsekuensinya dari pilihan pemain. Atlas sebagai guide permainan yang berargumen bahwa pemain membutuhkan ADAM (amunisi) dengan memanfaatkan anak-anak sedangkan Tenenbaum ditunjukkan sebagai seorang wanita yang memberikan instruksi humanis dan bermoral untuk tidak memanfaatkan anak-anak sebagai media untuk mendapatkan ADAM dengan membunuhnya.

Hasil penelitian ini menggunakan pentad drama menunjukkan bahwa retorika dari sebuah drama dari berbagai perspektif yang ditujukan kepada pemain dapat mempengaruhi tindakan dan motivasi berpikir pemain. Setiap tindakan memiliki konsekuensinya, bergantung kepada aktor dalam mengambil tindakan. Kesamaan penelitian ini dengan milik peneliti sama-sama menggunakan analisis pentad drama. Perbedaannya pada objek penelitian dan peneliti menggunakan kajian komunikasi politik *genre political actor and rhetoric*.

2.6.5. *Ethical Elitism: A Burkean Analysis of the Rhetorical Construction of a Moral Persona in The First Term of President George W Bush*

Disertasi penelitian Koehn (2010) menganalisis pidato dan pernyataan yang disampaikan secara retorik Bush dalam masa jabatan pertamanya. Tujuannya untuk fokus melihat isu-isu moral dan etika yang coba dibangun Bush dalam setiap pidatonya. Hasilnya topik retorika yang digagas Bush terkait teror dan perang merupakan ancaman bagi keamanan global yang dialamatkan kepada negara Irak dan Afganistan bahwa Irak merupakan ancaman nuklir, nada yang sama juga ditekankan Bush saat memberikan pidato tentang Afganistan dia menjelaskan bahwa negara tersebut terdiri dari pemimpin korup yang

menghancurkan orang-orang yang tinggal di Afganistan dan secara bersamaan menawarkan ancaman lanjutan ke AS. Dan isu-isu moral lain terkait menolak mengakui amandemen konstitusional pernikahan sesama jenis. Koehn dalam setiap pidatonya Bush sebagai *agent* memosisikan dirinya yang konservatif sebagai menjaga kehidupan manusia (*pro-life*) menolak pernikahan sesama jenis, secara tegas mendukung hukum yang melarang percobaan penelitian *embryonic stem cell* yang bertentangan dengan nilai-nilai kristiani ortodoks.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Koehn menunjukkan, penggunaan dramatisme serta analisis pentad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, sebagaimana hasil penelitian dari Koehn telah menunjukkan bahwa dramatisme serta analisis pentad telah mampu mengungkapkan bagaimana fokus retorika politik dari Bush sekaligus motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis pentad.

2.6.6. *A Holistic Approach to Stakeholder Management: A Rhetorical Foundation*

Smudde & Courtright (2011) dalam penelitiannya melakukan analisis menggunakan *pentad* terkait masalah sehari-hari dalam mengelolapara pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan hal penting bagi seorang praktisi *Public Relation* dan akademisi. "*Stakeholder Theory*" memasukkan basis pengetahuan tentang pemangku kepentingan, siapa individu dan kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi. Dengan menggunakan analisis pentad, maka akan membantu praktisi *Public Relation* untuk melakukan analisis dan

perencanaan, identifikasi, penciptaan, peningkatan hubungan dengan *stakeholder*. Di tingkat ini hexad mengungkap dimensi mikropis penting bagi *stakeholder*. Pada akhirnya kombinasi analisis teori dan kasus disintesis menjadi pendekatan prospektif terhadap manajemen pemangku kepentingan yang mungkin digunakan organisasi selama perencanaan strategis. Tingkat pemahaman makroskopis akan memungkinkan praktisi untuk benar-benar melihat dinamika praktik pengelolaan stakeholder yang lebih baik dengan diakomodasi oleh upaya perencanaan strategis efektivitas pendekatan manajemen pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Smudde & Courtright terdapat perbedaan objek penelitian. Smudde & Courtright melakukan analisis hexad untuk kepentingan praktisi *Public Relation* sedangkan peneliti menggunakan *hexad* dalam kajian komunikasi politik pendekatan studi *political actor and rhetoric*. Namun hal tersebut bukan sebagai halangan, persamaan metode yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan dramatisme serta analisis hexad dalam komunikasi politik terbukti bekerja dengan baik, mampu mengungkapkan dimensi retorika politik dari Basuki Tjahaja, pengelolaan bahasanya, ditujukan kepada siapa, bagaimana sikap dan siapa saja aktor-aktor pro-kontra dalam interaksi komunikasi yang terjadi sekaligus menelusuri motif dari penggunaan retorika tersebut. Sehingga hal ini sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menggunakan dramatisme serta analisis *hexad*.

2.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini awalnya berangkat pada fenomena Basuki Tjahaja Purnama yang berkonflik dengan DPRD DKI Jakarta. Ia menggoreskan tulisan tajam “Pemahaman nenek lu!” dan “Gila” pada RAPBD (Rancangan Anggaran Belanja Daerah) yang diajukan DPRD DKI Jakarta yang dinilainya tidak masuk akal. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam sosok Basuki Tjahaja Purnama. Setelah melakukan interpretasi pada tayangan Basuki Tjahaja Purnama peneliti menemukan banyak kejadian menarik terkait tindakan komunikasi politik Basuki Tjahaja Purnama terutama dalam hal penggunaan bahasa dan pemilihan kata-katanya.

Penelitian ini melakukan pendekatan sosok Basuki Tjahaja Purnama dalam kajian komunikasi politik genre *political and rhetoric*. Berawal dari kajian komunikasi politik yang memiliki berbagai macam tema atau genre penelitian. Peneliti memilih *genre political actor and rhetoric* sebagai topik penelitian. Karena bidang genre tersebut masih sempit perhatian terutama di Indonesia berdasarkan data dari Graber (2005). Artikel-artikel lebih berorientasi ke arah hasil kampanye pemilu. Oleh karena itu peneliti ingin menambah menambah khasanah serta variasi terkait *genre political actor and rhetoric* dengan mengangkat tokoh politik tanah air yaitu Basuki Tjahaja Purnama.